

TESIS

**PELAKSANAAN PROGRAM BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
(BIAN) DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK
INDONESIA DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KENDAL**



NENENG FITRIA

NIM: 21.C2.0005

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

TESIS

**PELAKSANAAN PROGRAM BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
(BIAN) DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK
INDONESIA DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KENDAL**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan**



NENENG FITRIA

NIM: 21.C2.0005

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Salah satu hak kesehatan anak adalah memperoleh imunisasi, namun adanya pandemi covid-19 dengan kebijakan PSBB mengakibatkan penurunan cakupan imunisasi termasuk di Kab. Kendal. Pada tahun 2021 capaian imunisasi Jawa Tengah hanya mencapai 69,7% sedangkan targetnya 95% dan di Kab. Kendal capaian imunisasi di tahun 2022 hanya 79,6 % artinya masih ada 20,4% anak yang tidak mendapatkan hak atas imunisasi. Pemerintah mencanangkan program percepatan imunisasi melalui program BIAN, dan untuk mengetahui sejauh mana program ini dilaksanakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan program BIAN, pelaksanaannya dan faktor apa saja yang menjadi kendala di wilayah kerja Dinkes Kab. Kendal.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer melalui studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan bahanpustaka, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian semua data tersebut dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengaturan program BIAN di Kab. Kendal menggunakan dasar peraturan yang bersifat nasional yaitu: Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1113/2022, Kepdirjen P2P Nomor HK.02.02/C/2317/2022 dan SE Kemenkes RI Nomor SR.02.06/C/2506/2022, 2) Pelaksanaan BIAN di Kab. Kendal dinilai sudah memenuhi hak kesehatan anak meskipun belum optimal, hak atas imunisasi dipenuhi dengan memberikan imunisasi tambahan campak dan rubella serta imunisasi dasar lengkap bagi anak yang belum lengkap status imunisasinya melalui program kejar, hak atas sumber daya kesehatan dipenuhi dengan menyediakan vaksin dan logistik serta tenaga kesehatan melalui kegiatan mikroplaning, dan hak atas perlindungan risiko kesehatan dipenuhi dengan membentuk tim surveilans dan tim KIPI di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk melacak adanya penyakit PD3I dan kejadian KIPI, 3) Terdapat faktor yang menjadi kendala pelaksanaan BIAN, faktor yuridis: pengaturan bersifat nasional dan faktor non yuridis yaitu segala kendala yang bersifat teknis : tidak dilaksanakannya inventarisasi logistik, adanya mahasiswa magang yang melakukan penyuntikan vaksin sehingga mengakibatkan cedera suntikan, masih ada anak yang tidak terdata, dan adanya stigma negatif masyarakat terhadap imunisasi.

Kata kunci : Hak kesehatan anak, Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Dinas Kesehatan Kab. Kendal, KIPI

ABSTRACT

One of children's health rights is to receive immunizations, however, the Covid-19 pandemic with the PSBB policy has resulted in a decrease in immunization coverage, including in Kab. Kendal. In 2021, Central Java's immunization achievement will only reach 69.7%, while the target is 95% and in Kab. The immunization achievement threshold in 2022 is only 79.6%, meaning there are still 20.4% of children who do not have the right to immunization. The government has launched an accelerated immunization program through the BIAN program, and to find out how far this program has been implemented, the problem formulation in this research is: how is the BIAN program set up, its implementation and what factors are obstacles in the work area of the District Health Office. Kendal.

.This research used a descriptive-analytical method using a socio-legal study approach. The data collection was conducted by gathering primary data originating from interviews and observations as well as secondary data done by using library studies on primary, secondary and tertiary legal materials. The results were then analyzed qualitatively.

1) BIAN in Kendal Distric use: Minister of Health Decree Number HK.01.07/Menkes/1113/2022, Decree of the Director General of P2P Number HK.02.02/C/2317/2022 and SE of the Republic of Indonesia Ministry of Health Number SR.02.06/C/2506/2022, 2) Implementation of BIAN in Kab. Kendal is considered to have fulfilled children's health rights even though it is not optimal, the right to immunization is fulfilled by providing additional immunization against measles and rubella as well as complete basic immunization for children whose immunization status is not yet complete through a catch-up program, the right to health resources is fulfilled by providing vaccines and logistics and personnel health through microplaning activities, and the right to health risk protection is fulfilled by forming a surveillance team and AEFI team in the Kendal District Health Service area to track the presence of PD3I diseases and AEFI incidents, 3) There are factors that hinder the implementation of BIAN, juridical factors: national regulation and non-juridical factors, namely all obstacles of a technical nature: a logistical inventory was not carried out, there were interns who administered vaccine injections which resulted in injection injuries, there were still children who were not recorded, and there was a negative public stigma towards immunization.

Keywords: Children's rights, BIAN, Covid-19 pandemic, PD3I, KIPI